

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan multinasional mulai masuk di negara berkembang sekitar tahun 1990-an. Banyak keuntungan yang didapat oleh perusahaan multinasional di negara berkembang. Mereka memiliki kemudahan dari segi biaya, baik itu biaya tenaga kerja dan juga bahan baku. Tidak jarang juga perusahaan multinasional mendapatkan keringanan pajak di suatu periode tertentu. (Ferdausy & Rahman, 2009)

Di lain pihak suatu negara juga bisa mengambil keuntungan dari kehadiran suatu perusahaan multinasional. Karena hadirnya perusahaan multinasional dapat memberikan keuntungan bagi negara seperti meningkatkan *foreign direct investment* (FDI), transfer teknologi, dan membuka lapangan pekerjaan. (Ferdausy & Rahman, 2009)

Sejak hadirnya perusahaan multinasional, *foreign direct investment* (FDI) di negara berkembang mengalami peningkatan. Pada tahun 1990-an FDI di berkembang berada di angka US\$150 miliar. Namun mulai tahun 2005 FDI di negara berkembang meningkat di angka US\$334 miliar per tahun. Berdasarkan laporan dari *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), FDI di negara berkembang meningkat di tahun 2010 yang mencapai hampir US \$574 miliar (Zhan, *World Investment Report 2010: Investing in a Low Carbon Economy*, 2010). Meningkatnya FDI di suatu negara dapat meningkatkan pertumbuhan di suatu negara. (Ferdausy & Rahman, 2009)

Seperti yang diketahui, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara berkembang lebih lambat jika dibandingkan dengan negara maju. Hadirnya perusahaan multinasional diharapkan mampu mempercepat perkembangan iptek di negara berkembang. Karena lewat perusahaan multinasional, suatu negara dapat mengambil keuntungan dari

penelitian dan teknologi canggih yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. Berkembangnya iptek dapat meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan pembangunan. (Ferdausy & Rahman, 2009)

Adanya perusahaan multinasional juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dari 73 juta lapangan pekerjaan yang tercipta dari adanya perusahaan multinasional, terdapat 12 juta lapangan pekerjaan yang berada di negara berkembang (Bangura, 2010). Dengan tersedianya lapangan pekerjaan, perusahaan multinasional juga turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena perusahaan multinasional cenderung memberikan upah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan lokal. Dengan adanya lapangan pekerjaan, tentu saja akan mengurangi angka kemiskinan. (Ferdausy & Rahman, 2009)

Di samping memberikan kontribusi formal seperti transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan *foreign direct investment* (FDI). Perusahaan multinasional juga diharapkan memberikan kontribusi di bidang-bidang informal di daerah operasi mereka dalam bentuk *corporate social responsibility* (CSR).

Sejumlah daerah telah melakukan kerja sama CSR dengan perusahaan multinasional. Sebagai contoh di Kabupaten Klaten yang melakukan kerja sama CSR dengan Aqua Danone. Berdirinya pabrik Aqua Danone di Klaten mengundang reaksi pro dan kontra dari masyarakat sekitar terutama kelompok petani. Mereka menganggap Aqua Danone akan melakukan privatisasi dan eksploitasi air. Masyarakat yang tidak setuju dengan adanya pabrik tersebut membentuk organisasi yaitu KRAKED (Koalisi Rakyat Klaten untuk Keadilan) yang dimaksudkan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dan meminta peninjauan kembali eksplorasi sumber air Sigedang. (Zain, 2015)

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pihak Aqua Danone memberikan CSR kepada desa yang sumber airnya digunakan oleh perusahaan. Selain itu, Aqua Danone juga

menggandeng lembaga swadaya masyarakat untuk secara bersama mengembangkan program CSR koperasi lembaga pengembangan agribisnis Pusur Lestari atau koperasi “LPA Pusur Lestari” dan pemberdayaan lingkungan. (Zain, 2015)

Contoh lain, PT Unilever Indonesia juga melakukan CSR di Yogyakarta pada bidang lingkungan. Total ada 20 bank sampah di Yogyakarta berada di bawah naungan PT Unilever Indonesia yang salah satunya bernama bank sampah Suryo Resik. Bank sampah ini didirikan pada 8 September 2013. (Hasna, 2018)

Terbentuknya bank sampah Suryo Resik ini tidak terlepas dari peran PT Unilever Indonesia. Oleh karena itu PT Unilever Indonesia juga memberikan berbagai pelatihan terhadap anggota bank sampah Suryo Resik seperti pelatihan membuat dengan bahan kertas bekas semen. Di samping itu anggota bank sampah Suryo Resik juga diberi pelatihan untuk dapat mendaur ulang sampah menjadi barang bernilai jual. (Hasna, 2018)

Daerah lain yang juga menjalin kerja sama CSR dengan perusahaan multinasional adalah PT. Nestle Indonesia Panjang Factory di Lampung. Dalam pelaksanaannya, PT. Nestle Indonesia Panjang Factory sudah menerapkan konsep *creating shared value* (CSV). CSV merupakan kebijakan dari perusahaan untuk meningkatkan daya saing bersamaan dengan meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di tempat perusahaan tersebut beroperasi. (Yoga, Sunaryo, & Wardani, 2018)

PT. Nestle Indonesia Panjang Factory telah melakukan kerja sama dengan kelompok petani kopi di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung sejak awal 1994. Perusahaan tersebut melakukan pelatihan kepada kelompok petani mulai dari pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang terdiri dari 100 sampai 1000 petani kopi dalam satu KUB. Lalu juga membentuk sekolah lapang yang digunakan sebagai tempat bagi kelompok petani untuk memperoleh pelatihan khusus yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas

kopi. Hasilnya, kelompok petani di Kabupaten Tanggamus mampu menghasilkan kopi unggulan robusta. (Yoga, Sunaryo, & Wardani, 2018)

Seperti yang penulis sebutkan di atas, bahwa ada sejumlah daerah yang telah melakukan kerja sama CSR dengan perusahaan yang melakukan investasi di daerah mereka. Oleh karena itu Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan untuk membahas CSR ExxonMobil di Bojonegoro. Hal tersebut di dasarkan pada penulis yang tumbuh dan besar di Bojonegoro, sehingga sangat memahami permasalahan yang terjadi pada masyarakat Bojonegoro. Disamping itu, CSR dari ExxonMobil untuk masyarakat Kabupaten Bojonegoro mencapai angka Rp. 25 miliar yang ditujukan untuk bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Angka tersebut menjadi yang paling besar, jika dibandingkan dengan dua perusahaan migas lainnya yang juga memberikan CSR yaitu Pertamina EP Cepu Corporate dengan dana Rp. 6 miliar dan Pertamina EP Asset 4 dengan dana Rp. 2,5 Miliar (Sujatmiko, 2020). Sehingga, menurut penulis akan lebih efektif apabila melakukan penelitian terhadap CSR yang diberikan oleh ExxonMobil kepada masyarakat Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang kaya akan minyak dan gas bumi. Berdasarkan dari kajian teknis yang dilakukan oleh ExxonMobil Cepu Limited, blok cepu mempunyai cadangan minyak sebesar 823 juta barel (Wicaksono, 2019). Di samping itu Kabupaten Bojonegoro adalah daerah dengan jumlah penduduk yang padat. Tercatat pada 2019 Kabupaten Bojonegoro mempunyai jumlah penduduk sebesar 1.331.077 jiwa (NN, 2019).¹ Namun keunggulan tersebut belum mampu dimanfaatkan secara maksimal. Karena Kabupaten Bojonegoro memiliki keterbatasan dalam pendanaan dan juga teknologi yang belum memadai.

¹ NN, "Demografi Kabupaten Bojonegoro", <http://www.bojonegorokab.go.id/demografi>, diakses pada 3 Desember 2020

Tidak hanya sampai di situ Kabupaten Bojonegoro juga memiliki permasalahan dalam hal kurangnya kesejahteraan masyarakat.

Masalah kurangnya kesejahteraan timbul akibat dari kurangnya lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan tentu saja akan meningkatkan angka pengangguran. Terjadi peningkatan angka pengangguran di Kabupaten Bojonegoro dari tahun 2014 ke 2015. Pada 2014 angka pengangguran sebanyak 3,32% lalu naik menjadi 5,01% di 2015 (BPS, 2016). Di tahun 2016 angka pengangguran di Kabupaten Bojonegoro juga mengalami kenaikan sebesar 1,2%. (Handoyo, 2017)

Selain memiliki masalah tentang kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Bojonegoro juga masih berusaha untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Pada tahun 2019 IPM Kabupaten Bojonegoro sebesar 68,75 dan menduduki posisi ke 26 dari total 38 kabupaten di Jawa Timur (BPS, 2020). Bila dibandingkan dengan Kabupaten Lamongan yang merupakan kabupaten yang berdekatan dengan Bojonegoro, angka tersebut masih tertinggal jauh. Pada 2019 Kabupaten Lamongan mencatat IPM 72,57 yang menempatkannya pada peringkat 16 dari total 38 kabupaten di Jawa Timur. (BPS, 2020)

ExxonMobil sebagai perusahaan multinasional yang melakukan operasi di Kabupaten Bojonegoro, diharapkan mampu memberikan solusi untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Mulai dari kurangnya anggaran pembangunan, lapangan pekerjaan, dan masalah sosial lainnya. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat kontribusi bagi hasil migas maupun program *corporate social responsibility* (CSR).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh CSR ExxonMobil terhadap keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro ?”

C. Kerangka Teori

1. Teori Pembangunan

Setelah Perang Dunia II, pembangunan menjadi fokus bagi setiap negara. Pada saat itu kemajuan suatu negara di ukur dengan laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, suatu negara dapat dikatakan maju apabila negara tersebut memiliki perekonomian yang stabil, dinamis, dan rakyat yang sejahtera. (Yamin & Haryanto, 2017)

Cara yang sering digunakan untuk mengukur pembangunan suatu negara adalah dengan melihat produk nasional bruto (PNB) dan perbandingan PNB antarnegara. Negara dapat dikatakan memiliki pembangunan yang maju apabila terjadi peningkatan PNB nya. Jika negara berkembang mampu mengurangi perbedaan PNB negaranya dengan PNB negara maju maka dapat dikatakan negara tersebut mulai menjadi negara maju. Istilah tersebut disematkan kepada beberapa negara seperti Korea Selatan, Singapura, Hongkong, dan Taiwan yang di sebut negara industry baru. (Griffiths, O, & Roach, 2008)

Selain mengukur lewat PNB, pemenuhan kebutuhan pokok juga menjadi indikator dalam pembangunan. Jika suatu negara mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti rumah, makanan, kesehatan, dan pendidikan, maka negara tersebut bisa dikatakan sudah mampu melakukan pembangunan dengan baik. Selain itu, juga memastikan bahwa setiap orang hidup di atas garis kemiskinan merupakan hal yang penting, karena hal tersebut dapat

digunakan untuk melihat keberhasilan negara dalam melakukan distribusi kekayaan lewat pembangunan. (Griffiths, O, & Roach, 2008)

Secara umum, konsep pembangunan dipengaruhi oleh dua ideologi besar yaitu liberalisme kapitalisme dan sosialisme. Konsep pembangunan dari kapitalisme-liberal adalah memberikan kebebasan kepada pasar untuk mengatur segala interaksi yang terjadi yang disebut dengan “*invisible hand*”. Kaum liberalis kapitalis percaya bahwa jika suatu perekonomian negara ingin maju, maka peran yang dimiliki oleh negara harus diperkecil. Berbeda dengan kaum kapitalis liberalis, kaum sosialis memberikan peran yang besar kepada negara untuk mengatur pasar dan perekonomian. Mereka percaya bahwa kepemilikan bersama akan melahirkan kesejahteraan. (Yamin & Haryanto, 2017)

Menurut Rostow dalam bukunya “*The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*” ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh negara berkembang untuk maju secara ekonomi yaitu: Masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan, dan masa konsumsi tinggi. (Rostow, 1960)

Masih menurut Rostow, terjadinya pembangunan ekonomi juga akan menyebabkan terjadinya perubahan antara lain :

1. Perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial
2. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga
3. Perubahan kegiatan investasi dalam masyarakat
4. Perubahan sikap hidup dan adat istiadat (Rostow, 1960)

2. Analisis Hubungan Negara, Pasar, Dan Masyarakat

Negara

Negara adalah pemerintah, birokrasi, dan berbagai instrumen lainnya. Negara memiliki peran vital dalam kegiatan ekonomi, masyarakat, dan politik. Fungsi utama negara sebagai

lembaga politik adalah untuk menjadi tempat bagi berjalannya kegiatan pasar dan masyarakat. Oleh karena itu negara mempunyai tanggung jawab untuk mengelola interaksi yang terjadi antara pasar, masyarakat, dan negara itu sendiri agar dapat berjalan secara beriringan.

Pasar

Pasar dapat diartikan sebagai lembaga-lembaga ekonomi kapitalisme modern. Pasar menjadi tempat bagi sesama individu untuk saling menunjukkan kepentingan mereka sekaligus tempat kompetensi. Pasar mempunyai kekuatan untuk dapat mempengaruhi perilaku manusia, karena pasar dapat memaksa manusia untuk membuat produk yang lebih baik dari kompetitornya untuk dapat memenuhi kepentingan pribadi mereka. (Caporaso & Levine, 2005)

Jika dilihat dari perspektif budaya, pasar adalah tempat terjadinya interaksi masyarakat dalam berbagai hal seperti ekonomi dan sosiokultural. Selain itu dalam aspek politik pasar dikatakan sebagai pusat kepentingan bisnis tanpa memperhatikan berbagai aspek lainnya. Menurut kapitalisme, pasar mempunyai fungsi untuk melayani kepentingan masyarakat lewat kegiatan produksinya. (Aminah, 2011)

Masyarakat

Masyarakat dapat didefinisikan sebagai kehidupan sosial yang berada di luar lingkaran keluarga, pasar, dan negara di mana individu-individu warga negara dapat membentuk organisasi atau kelompok dengan tujuan mencapai kepentingan bersama. Masyarakat dapat membentuk berbagai organisasi seperti kelompok kepentingan, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat. (Aminah, 2011)

Hubungan Negara, Pasar, Dan Masyarakat

Terdapat dua penjelasan dari perspektif analitis ekonomi politik yang dapat menjelaskan mengenai hubungan negara, pasar, dan masyarakat. Pertama pendekatan yang

mendukung negara memiliki peran yang minimal untuk menerapkan suatu kebijakan. Kedua, pendekatan yang mendukung negara memiliki peran yang lebih besar untuk menerapkan suatu kebijakan agar tidak muncul masalah dalam mengimplementasikan kebijakan. (Aminah, 2011)

Dalam perspektif ekonomi politik, negara selalu diposisikan untuk berhadapan dengan pasar begitupun sebaliknya, pasar selalu diposisikan berhadapan dengan negara. Terdapat dua bentuk penjelasan dari perspektif ekonomi politik ini. Pertama, negara dapat melakukan intervensi apabila pasar mengalami kegagalan dalam menyeimbangkan pasar. Kedua, negara tidak diizinkan untuk ikut campur dalam urusan pasar. Karena pasar memiliki mekanisme sendiri untuk dapat menciptakan keseimbangannya. Perspektif ekonomi politik menyatakan bahwa negara dan pasar memiliki hubungan yang saling terikat dan hubungan tersebut memberikan dampak terhadap masyarakat. (Aminah, 2011)

Namun, dalam beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran peran negara. Hal tersebut diakibatkan dari perubahan ekonomi politik yang membuat peran negara semakin lemah. Negara mengalami kesulitan untuk dapat memberikan kebutuhan dasar bagi publik. Selain itu, negara juga mengalami keterbatasan untuk melakukan pembangunan bagi masyarakat. Oleh karena keterbatasan yang dimiliki negara, hal tersebut membuat peran pengusaha dan investor semakin menguat. (Caporaso & Levine, 2005)

3. Konsep Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia, pertama kali diperkenalkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR) tahun 1990. Menurut UNDP pembangunan manusia adalah proses untuk memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Khususnya tiga pilihan yang terpenting bagi manusia yaitu menjalani hidup sehat dan berumur panjang, mendapatkan pengetahuan, dan mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup layak. (Haq, 1990)

Masih menurut UNDP, manusia haruslah menjadi pusat dari pemabangunan itu sendiri. Karena tujuan utama dari pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang dapat membuat masyarakatnya dapat berumur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang prduktif. Pembangunan bukan hanya untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kekayaan. (Haq, 1990)

Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan manusia. Pertama, meningkatkan kemampuan manusia seperti meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan. Kedua, cara manusia untuk mampu memanfaatkan kemampuan yang mereka dapatkan agar menjadi produktif. Oleh karena itu, proses pembangunan manusia haruslah mampu memenuhi keduanya. (Haq, 1990)

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah menetapkan peringkat pembangunan manusia pada skala 0,0-100,0 dengan kategori sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi: $IPM > 80$
2. Tinggi: IPM antara $70 < IPM < 80$
3. Sedang: IPM antara $60 < IPM < 70$
4. Rendah: $IPM < 60$

Menurut UNDP, terdapat empat komponen utama yang harus ada dalam konsep pembangunan manusia, untuk menjamin tercapainya tujuan dari pembangunan manusia yaitu:

1. Produktivitas

Setiap individu harus mampu meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi dalam proses memperoleh penghasilan dan lapangan kerja. Karena pembangunan ekonomi adalah bagian dari konsep pembangunan manusia,

2. Pemerataan

Masyarakat harus mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat mengakses segala sumber daya. Berbagai hambatan politik dan ekonomi harus dihapuskan agar masyarakat dapat berpartisipasi.

3. Keberlanjutan

Setiap generasi harus diberikan kesempatan yang sama untuk dapat mengakses setiap peluang. Segala bentuk modal seperti manusia, sumber daya alam, dan alat harus dilengkapi.

4. Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, selain itu masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi hidup mereka. (Haq, 1995)

D. Hipotesa

Pengaruh ExxonMobil terhadap pembangunan manusia di Bojonegoro adalah mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia di Bojonegoro.

E. Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh CSR ExxonMobil terhadap efektivitas pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro.

F. Batasan Penelitian

Untuk membatasi jangkauan penelitian, penulis memfokuskan pada kontribusi CSR ExxonMobil terhadap pembangunan di Kabupaten Bojonegoro antara tahun 2008 hingga 2016.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai dengan argumen yang relevan. Jenis penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan kepada teknik library research atau penelitian kepustakaan. Data-data yang diperoleh adalah data valid dan merupakan data sekunder yang didapatkan dari media cetak berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen. Selain itu, data juga didapatkan dari media internet seperti situs resmi ataupun situs berita, serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan dengan objek penelitian serta dapat menunjang proses penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi tentang ketentuan utama dalam proses penyusunan skripsi yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori dasar, hipotesa, dan metode penelitian.

Bab 2 : Program CSR ExxonMobil

Di dalam bab ini, penulis akan mengawali dengan menjelaskan *multinational corporation*, ExxonMobil, ExxonMobil di Bojonegoro, keterbatasan Pemerintah Daerah Bojonegoro dalam pembangunan indeks pembangunan manusia, dan CSR ExxonMobil di bidang pembangunan manusia.

Bab 3 : Kesimpulan

Di dalam bab ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan dari setiap analisa yang dijelaskan pada bab sebelumnya.